

**UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
MASYARAKAT DESA MELALUI STRATEGI PENGEMBANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA MELIRANG
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK**

Niswatun Hasanah, M.A¹

ABSTRAK

Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulan dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan saat ini adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi yang tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah tetapi didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi desa yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Bentuk kelembagaan tersebut dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana strategi yang dilakukan untuk pengembangan BUMDes di Desa Melirang. Dan Bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui strategi pengembangan BUMDes. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif - kualitatif dengan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Analisis data penelitian dilakukan melalui dua prosedur, yaitu analisis selama proses pengumpulan data dan analisis setelah pengumpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi yang dilakukan oleh BUMDes pada dasarnya sudah memenuhi fokus capaian dengan berhasilnya pengembangan usaha-usaha yang ada dan pengelolaan korporasi dari BUMDes. Hal ini dapat dijelaskan bahwa fokus capaian jika dilihat dari segi bisnis, korporasi dan fungsionalnya BUMDes “eMHa” sudah memenuhinya. Akan tetapi masih ada hal yang perlu diperbaiki yaitu pada level korporasi/lembaga. Adapun Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat yang telah dilakukan oleh BUMDes “eMHa” melalui pemberdayaan masyarakat yaitu dalam bentuk menjalin kerjasama (menjadikan masyarakat sebagai mitra usaha) dalam produksi barang-barang usaha masyarakat. Begitu juga produksi pupuk guano yang merupakan produksi pupuk milik desa karena usaha ini telah dikembangkan dan dibangun berdasarkan kultur dan kondisi warga desa. Bentuk upaya ini merupakan *Sosio-culture* yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan kultur yang diperlukan oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Upaya peningkatan kesejahteraan, Kesejahteraan ekonomi, Strategi Pengembangan dan BUMDes.*

¹ Peneliti merupakan Dosen IAI Qomaruddin Gresik yang telah mendapatkan dana hibah penelitian Kluster Bantuan Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan dari DIKTIS KEMENAG RI tahun 2018. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada DIKTIS KEMENAG RI yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi desa-desa yang akan mendirikan BUMDes agar lebih memahami manajemen dan kelembagaan BUMDes itu sendiri.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu perwujudan dari cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya upaya mewujudkan kesejahteraan termasuk hakekat dari pembangunan nasional yang diharapkan mampu menuju pada keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada dasarnya ekonomi masyarakat mempunyai potensi untuk semakin berkembang, jika seluruh lapisan bangsa menyadari perlunya pemerataan sebagai perwujudan dari keadilan sosial. Artinya ekonomi masyarakat kecil yang selama ini tergusur atau tertekan, perlu benar-benar digarap jika selama ini pembangunan yang dilakukan cenderung berformalisasi karena segala sesuatunya telah ditetapkan dan diatur dari atas, maka dalam pembangunan yang memihak masyarakat menuntut semua perencanaan keputusan dan pelaksanaan dilakukan masyarakat sendiri.²

Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal hidup layak dapat diartikan sebagai kemiskinan. Menurut Frank Ellis bahwa kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut 3 aspek yaitu aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis.³ Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor yang harus segera diatasi, salah satunya dengan cara melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Cara ini dapat menumbuhkan kembali model pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat atau dalam konteks saat ini disebut dengan pola pemberdayaan masyarakat (*community development*).⁴

² Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: UII Press, 2000. Hlm: 7

³ Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*, Yogyakarta: Media Wacana, 2007. Hlm: 14-15.

⁴ Anggriena Mardha Kashi dan Ahmad Zuber, *Upaya Pengentasan Buruh Genteng Melalui Kegiatan Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Jurnal Sosiologi DILEMA, Vol. 31 No. 1 Tahun 2016. Hlm: 2

Muhammad Yunus dalam bukunya *Bank Kaum Miskin*⁵ menjelaskan bahwa kemiskinan tercipta karena kita membangun kerangka teoritis berdasarkan asumsi-asumsi yang merendahkan kapasitas manusia, dengan merancang konsep-konsep yang terlampau sempit (seperti konsep bisnis, kelayakan kredit, kewirausahaan, lapangan kerja) atau mengembangkan lembaga-lembaga yang belum matang (seperti lembaga-lembaga keuangan yang tidak mengikutkansertakan kaum miskin). Kemiskinan disebabkan oleh kegagalan pada tataran konseptual dan bukan kurangnya kapabilitas di pihak rakyat.

Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulan dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan saat ini adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi yang tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah tetapi didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi desa yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.⁶

Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

Desa Melirang merupakan salah satu dari 22 desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Jawa Timur yang mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini baru berdiri pada bulan April Tahun 2015 tetapi secara operasionalnya berjalan mulai bulan Januari 2016 dengan modal awal berjumlah Rp. 9.500.000,00 dan sekarang di Tahun 2018 asset yang dimiliki sudah mencapai sekitar ± 700 juta. Adapun perputaran

⁵ Muhammad Yunus dan Alan Jolis, *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*. Terjemahan: Irfan Nasution, Depok: Marjin Kiri, 2007. Hlm: 274.

⁶ Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Malang: DEPDKNAS PKDSP FEUB, 2007. Hlm: 2

dana perbulannya sekitar \pm 70 juta yang dialokasikan ke berbagai macam jenis usaha yang berjumlah 30 jenis diantaranya terdapat simpan pinjam, bank sampah, pengelolaan pembayaran listrik, STNK, ATM BRI Link, pengolahan kotoran kelelawar dll.⁷

Masyarakat Desa Melirang, sebagian besar masyarakatnya mempunyai kesejahteraan ekonomi di tingkat menengah. Banyak dari mereka mempunyai pekerjaan di bidang kewirausahaan, Pegawai Negeri Sipil, guru atau di luar itu yaitu sebagai buruh pabrik dengan UMR kota Gresik dan juga petani. Bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan dalam bidang kewirausahaan, beberapa diantara mereka merasa terbantukan dengan adanya usaha-usaha yang dimiliki oleh BUMDes Melirang karena salah satu usahanya yaitu simpan pinjam dapat memberikan bantuan bagi masyarakat baik untuk tujuan konsumtif (misalnya untuk biaya sekolah anak atau untuk membeli kebutuhan keluarga) atau untuk tujuan produktif (permodalan usaha, bermitra, pendampingan, dll) tetapi dengan adanya perbatasan pinjaman yang telah ditentukan dari pihak BUMDes. Adapun usaha lain salah satunya adalah usaha pengolahan kotoran kelelawar yang diperjual-belikan sebagai pupuk bagi para petani yang membutuhkan dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pupuk yang telah diperjual-belikan oleh pabrikan. Sehingga dengan kata lain, adanya pengelolaan BUMDes di desa-desa akan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Dalam analisis konsep AGIL oleh Talcott Parsons mengenai pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat bahwa setiap sistem sosial mempunyai empat masalah fungsional utama yaitu⁸ adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*) dan pemeliharaan

⁷ Wawancara dengan ketua BUMDesa “eMHa” yaitu Ibu Eka Wahyunidatul Hijjah, S.Pd pada tanggal 12 April 2018.

⁸ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004. Hlm: 257

pola (*Latency*). Pengelolaan suatu organisasi itu terletak pada mainset para pengelolanya atau para pengambil kebijakan yang tidak hanya terkonsep secara teoritis saja tetapi diperlukan suatu strategi pengembangan secara *socio-culture* sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk lebih dalam meneliti strategi pengembangan usaha-usaha yang dimiliki oleh BUMDes Melirang sehingga dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dengan judul penelitian yaitu “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk pengembangan BUMDes di Desa Melirang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui strategi pengembangan BUMDes?

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis strategi yang digunakan dalam pengembangan BUMDes di Desa Melirang sehingga memberikan peluang para pengusaha mikro kecil, tidak menjadi pesaing tetapi menjadi mitra dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Menganalisis upaya yang dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui strategi pengembangan BUMDes sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi semakin lebih baik tanpa mematikan usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat desa sebelumnya.

1.4. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis maupun praktis kepada beberapa pihak. Berkaitan dengan manfaat teoretis, penelitian ini diharapkan akan memperluas pengetahuan tentang teori sosiologi yang

perlu diterapkan dalam pengembangan sebuah Badan Usaha Milik Desa. Adapun berkaitan dengan manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun suatu strategi adaptasi untuk mencapai keberhasilan interaksi dalam pengelolaan pengembangan Badan Usaha Milik Desa sehingga mampu mensejahterakan masyarakat.

Jika kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara lahir/material berupa kesejahteraan ekonomi maka diharapkan kesejahteraan secara spiritualnya pun dapat terpenuhi. Oleh karena itu, dalam pengelolaan BUMDes pun tidak boleh hanya sekedar mementingkan laba/keuntungan pribadi lembaga saja tetapi lebih dari itu adalah untuk kepentingan masyarakat sehingga ketika salah satu usaha dari BUMDes berupa usaha simpan pinjam itu dibuat maka manajemen yang dilakukan harusnya menerapkan asas *tasamuh*⁹ dalam bermuamalah dan tidak ada kedholiman diantara pengelola dengan nasabahnya.

Hasil penelitian ini pun diharapkan memberikan sumbangsih secara teoritis maupun praktis baik secara materil maupun spiritual. Karena pengelolaan BUMDes yang usahanya lebih banyak bergerak di simpan pinjam maka bagi peneliti hal itu dirasa sangat perlu dikaji secara komprehensif dengan memasukkan teori Ekonomi Islam di dalamnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya mencari keuntungan saja tetapi bagaimana memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini salah satunya yang penulis sebutkan adalah:

⁹ *Tasamuh* merupakan "sama-sama berlaku baik, lemah lembut dan saling pemaaf." Dalam pengertian istilah umum, *tasamuh* adalah "sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam." Menurut bahasa berarti tenggang rasa, sedangkan menurut istilah *Tasamuh* berarti menghargai sesama. Ada yang bilang maksud dari *Tasamuh*/toleransi adalah bersikap menerima dan damai terhadap keadaan yang dihadapi, misalnya toleransi dalam agama, maksudnya antar agama saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing tidak saling mengganggu.

1. A.Ghofar Purbaya (OECONOMICUS, Journal Of Economics, Vol. 1, No. 1, Des 2016) dengan Judul *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil Laut di Pantai Kenjeran Lama Surabaya* merupakan Penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Adapun hasilnya adalah Terdapat beberapa ketidaksejahteraan dalam konsep modern pada masyarakat pengusaha krupuk dan camilan hasil laut pantai kenjeran lama dan terdapat beberapa strategi yang sesuai untuk pengusaha kerupuk dan camilan hasil laut di pantai kenjeran lama surabaya.
2. Anggria Mardha Kashi dan Ahmad Zuber (jurnal sosiologi DILEMA UNS, Vol. 31 No. 1 Th 2016) dengan judul *Upaya Pengentasan Buruh Genteng Melalui Kegiatan Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus di Sentra Industri Genteng Desa Kebulusan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen)*. Jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasilnya adalah Partisipasi buruh dalam bentuk penyampaian pemikiran dan tanggapan terhadap informasi dan permasalahan sekitar dirasakan belum maksimal. Keaktifan penyampaian pendapat hanya oleh kalangan pemerintah desa, seperti Ketua RW, Ketua RT, dan perangkat desa. Warga hanya sebatas penerima pasif saja.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan di atas. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu strategi pengembangan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena menurut sepengetahuan peneliti, dengan meningkatnya hasil usaha yang dikelola dan dikembangkan oleh BUMDes di Desa Melirang seharusnya memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di desa tersebut.

2.LANDASAN TEORI

2.1. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.¹⁰

Kesejahteraan menurut Nasikun, dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (1) rasa aman (*security*), (2) kesejahteraan (*welfare*), (3) kebebasan (*freedom*), (4) jati diri (*identify*).¹¹

Kriteria yang paling banyak digunakan dalam menilai ekonomi kesejahteraan adalah *pareto criteria* yang dikemukakan oleh ekonom berkebangsaan Italia bernama Vilfredo Pareto. Kriteria ini menyatakan bahwa suatu perubahan keadaan (eg. *Intervention*) dikatakan baik atau layak jika dengan perubahan tersebut ada (minimal satu) pihak yang diuntungkan dan tidak ada satu pihakpun yang dirugikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam *pareto criteria* adalah *pareto improvement* dan *pareto efficient*. Kedua hal ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan suatu kebijakan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan *pareto improvement* adalah jika keputusan perubahan masih dimungkinkan menghasilkan minimal satu pihak yang *better off* tanpa membuat pihak lain *worse off*. *Pareto efficient* adalah sebuah kondisi di mana tidak dimungkinkan lagi adanya perubahan yang dapat mengakibatkan pihak yang diuntungkan (*bettering off*) tanpa menyebabkan pihak lain dirugikan (*worsening off*).¹²

Dalam teori ekonomi mikro ada yang dikenal dengan teori Pareto yang menjelaskan tentang tiga jenis tingkatan kesejahteraan, yaitu *pertama* pareto optimal, dalam tingkatan pareto optimal terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan

¹⁰ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro*, Jakarta: Gemapress, 1999, Hlm: 23.

¹¹ Nasikun, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1996.

¹² A. Ghofar Purbaya, *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil Laut di Pantai Kenjeran Lama Surabaya*, OECOMICUS: Journal Of Economics, Vol. 1, No. 1, Des 2016., Hlm: 76.

orang atau kelompok lain. *Kedua* pareto non-optimal, dalam kondisi pareto non-optimal terjadinya kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. *Ketiga* pareto superior, dalam kondisi pareto superior terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Menurut teori pareto tersebut, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada kondisi pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan.¹³

2.1.2. Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Kebahagiaan merupakan tujuan utama dalam kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya dapat disebut dengan sejahtera.¹⁴

Sejahtera diterjemahkan dari kata *prosperous* yang berarti maju dan sukses, terutama dalam hal pendapatan dan memperoleh kekayaan yang cukup banyak.¹⁵ Keadaan tersebut merupakan keadaan dimana seseorang dapat pula dikatakan bahagia. Bahagia memiliki makna yang lebih luas, yang berarti kondisi atau perasaan nikmat dan nyaman yang bisa disebabkan oleh terpenuhinya kebutuhan material maupun spiritual.

Ekonomi Islam merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*)¹⁶, serta kehidupan yang baik dan

¹³ *Ibid.*, Hlm: 77

¹⁴ P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, Hlm: 1

¹⁵ *Ibid.*,....., Hlm: 50.

¹⁶ *Falah* berasal dari Bahasa Arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Dalam pengertian literal, *falah* artinya kemuliaan atau kemenangan yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah *al-falah* menurut islam di ambil dari kata al-Qur'an yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan

terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).¹⁷ Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Chapra ingin menegaskan (dengan membuat pemaparan cukup komprehensif terutama atas dasar dan dengan landasan filosofis dan teoritis), bahwa umat Islam tidak perlu berpaling ke Timur atau ke Barat dalam mewujudkan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi tetapi berpaling pada Islam. Dia mengamati bahwa banyak negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas Islam telah mengambil pendekatan pembangunan ekonomi dari Barat dan Timur, dengan menerapkan system kapitalis, sosialis atau negara kesejahteraan. Selama negara-negara Muslim terus menggunakan strategi kapitalis dan sosialis, mereka tidak akan mampu, berbuat melebihi negara-negara kapitalis dan sosialis, mencegah penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dengan demikian akan ditekan secara otomatis, menjadikannya sulit untuk merealisasikan *maqashid* meskipun terjadi pertumbuhan kekayaan.¹⁸

2.2. Pemberdayaan Masyarakat

pada aspek spiritual. Dalam konteks dunia, *falah* merupakan konsep multi dimensi. Sebagaimana dalam surat al-Mukminun ayat 1.

Falah *mencakup* aspek yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Aspek yang secara pokok meliputi spiritualitas dan moralitas, ekonomi, sosial dan budaya, serta dalam aspek mikro manusia membutuhkan: (a) pemenuhan kebutuhan biologis seperti kesehatan fisik atau bebas dari penyakit; (b) faktor ekonomis, misalnya memiliki sarana kehidupan; dan (c) faktor sosial, misalnya adanya persaudaraan dan hubungan antarpersonal yang harmonis. Dalam aspek makro, kesejahteraan menuntut adanya keseimbangan ekologi, lingkungan higienis, manajemen lingkungan hidup, dan kerjasama antaranggota masyarakat. Faktor-faktor ini baru akan lengkap jika manusia juga terbebas dari kemiskinan serta memiliki kekuatan dan kehormatan.

¹⁷ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, Hlm: 7.

¹⁸ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000, Hlm: 304.

Pembangunan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, seringkali lebih banyak terkonsentrasi pada pengukuran dan pengawasan modal sosial ketimbang berbuat sesuatu. Modal sosial menurut Putnam¹⁹ adalah bagian dari kehidupan sosial –jaringan, norma dan kepercayaan- yang mendorong partisipasi bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Ketika modal sosial sebagai kebijakan maka dalam pelaksanaannya tidak boleh adanya intervensi yang membatasi. Sebagaimana dalam Coleman bahwa intervensi negara dapat memperburuk daripada memperbaiki berbagai persoalan, bukan hanya pada esensinya modal sosial terdiri dari sejumlah aktivitas dan hubungan yang dilakukan secara bebas oleh individu, yang hanya dapat berhenti jika pemerintah lepas tanggung jawab dan menggantinya.²⁰

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Ginanjar Kartasasmita dalam I Nyoman Sumaryadi, mencakup pengertian “pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Pembangunan partisipatif mempunyai kaitan yang erat dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat.²¹

¹⁹ John Field, *Modal Sosial*, Yogyakarta: Kreasi wacana: 2018. Hlm: 51

²⁰ *Ibid*,....Hlm: 196.

²¹ Abdul Malik, Arif Nugroho dan Ahmad Sururi, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tertinggal Melalui Pemanfaatan IPTEK*, <https://www.researchgate.net/publication/319493010>

Konsep pemberdayaan masyarakat dari Gunawan Sumidiningrat (1999) dapat disimpulkan, bahwa:²² (1) pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek; (2) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya; (3) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh; (4) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien; dan (5) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.

Implementasi dalam pemberdayaan masyarakat, pendekatan yang digunakan adalah sosiologi. Teori sosiologi yang dapat diimplementasikan untuk pemberdayaan masyarakat adalah teori fungsionalisme struktural dengan sistem tindakan. Sistem tindakan skema AGIL tersebut diantaranya: organisme behavioral, sistem kepribadian, sistem sosial dan sistem kultural.²³

Dalam analisis konsep AGIL oleh Talcott Parsons mengenai pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat bahwa setiap sistem sosial mempunyai empat masalah fungsional utama yaitu²⁴ adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*) dan pemeliharaan pola (*Latency*). Pengelolaan suatu organisasi itu terletak pada mainset para

²² Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, Naskah Seminar Bappenas tanggal 6 Maret 2000.

²³ George Ritzer,... Hlm: 256-257.

²⁴ Ibid,.. Hlm: 257

pengelolanya atau para pengambil kebijakan yang tidak hanya terkonsep secara teoritis saja tetapi diperlukan suatu strategi pengembangan secara *socio-culture* sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut.

Muhammad Yunus dalam mengentaskan kemiskinan, menggunakan pendekatan sosiologi. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukannya dengan menggunakan “mata cacing” yang melihat dari jarak sangat dekat, hampir menyatuh dengan tanah yang dijelajahi secara pelan-pelan.²⁵ Sehingga dapat diketahui bentuk pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukannya.

2.3. Strategi Pengembangan

Menurut Stone, Freeman, dan Gilbert, Jr. (1995), konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu dari perspektif apa yang suatu organisasi/lembaga ingin lakukan (*intends to do*) dan dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*). Perspektif yang pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk organisasi/lembaga dan mengimplementasikan misinya. Sedangkan yang kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu.²⁶

Strategi dapat dibedakan berdasarkan tingkat agregasi (*level of aggregation*). Klasifikasi yang paling banyak dijumpai dalam literatur manajemen strategik adalah level fungsional, level bisnis, dan level korporasi. Pada level fungsional mencakup aspek-aspek fungsional spesifik dalam sebuah organisasi. Strategi pada level bisnis membutuhkan pengintegrasian strategi-strategi level fungsional untuk serangkaian produk dan/ jasa tertentu yang ditujukan bagi segmen pelanggan spesifik. Sedangkan strategi level korporat (*multi-business strategies*) dibutuhkan untuk menyelaraskan berbagai strategi level bisnisnya.²⁷ Inti dari level-level strategi di atas bahwa

²⁵ Muhammad Yunus,.... Hlm: xiii

²⁶ Fandy Tjiptono., *Strategi Pemasaran*, Edisi III, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008., Hlm: 3.

²⁷ Fandy Tjiptono, dkk., *Pemasaran Strategik*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008., Hlm: 135.

masing-masing mempunyai fokus sendiri-sendiri diantaranya pada level strategi korporat fokus pada penciptaan nilai tambah bagi *shareholder value*, level strategi bisnis fokus pada peningkatan business value dan level strategi fungsional fokus pada penciptaan *customer value*.

Strategi yang dibentuk oleh korporasi (lembaga) akan melalui tiga tahapan strategi, yaitu:²⁸

a) Analisis Strategi

Analisis ini terdiri dari analisis korporasi (lembaga) yang bertujuan untuk memahami kemampuan dan kelemahan korporasi (lembaga).

b) Pilihan Strategi

Terdiri dari tahapan sebagai berikut: identifikasi strategi yang memungkinkan, evaluasi pilihan strategi, dan menyeleksi strategi.

c) Implementasi Strategi

Implementasi ini diterapkan setelah melalui tahapan sebelumnya. Penerapan membutuhkan perencanaan dan alokasi sumber daya, desain, dan struktur organisasi serta pengaturan perubahan strategi. Hal ini dikarenakan adanya strategi baru yang menuntut perubahan besar.

2.4. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.²⁹

Tujuan Pendirian BUMDes diantaranya sebagai berikut ³⁰:

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Meningkatkan Pendapatan asli Desa
3. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

²⁸ *Op cit.*, Hlm: 129.

²⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 ayat 1.

³⁰ Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.... Hlm: 5.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan.³¹

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari³²:

1. Pemerintah Desa;
2. Tabungan masyarakat;
3. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pinjaman; dan/atau
5. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya (supra desa) untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di

³¹ Ibid... Hlm: 5-6.

³² PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 79 ayat 2.

wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.³³

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.

Mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan). Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya.³⁴

³³ Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.... Hlm: 2.

³⁴ Ibid... hlm: 4.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif - kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan menggunakan variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan dengan variabel lain. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.³⁵ Dengan Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), metode itu disebut penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat.

3.2. Sumber Data

Untuk menggali kelengkapan data tersebut, diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

1. Masyarakat desa
2. Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari seminar, buku-buku maupun literatur lain meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat 1-2 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
2. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes Tahun 2007.
3. Muhammad Yunus dan Alan Jolis, *Bank Kaum Miskin*, 2007.
4. George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, 2004.
5. John Field, *Modal Sosial*, 2018.
6. Jurnal-jurnal pemberdayaan sosial-ekonomi.

³⁵ Sugiyono., *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2010., Hlm: 23-29.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan melalui dua prosedur, yaitu analisis selama proses pengumpulan data dan analisis setelah pengumpulan data. Prosedur pertama dilakukan dengan langkah reduksi data, sajian data, dan pengambilan simpulan atau verifikasi yang sifatnya tentatif untuk diverifikasikan³⁶.

4. PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Wilayah

Desa Melirang Secara geografi berada pada titik koordinat Bujur: 112.541231 dan titik Koordinat Lintang: -7.033279. Sedangkan secara topografi terletak pada ketinggian 0 sampai 4 meter di atas permukaan air laut. mempunyai Jarak tempuh dari jalan raya menuju desa Melirang berkisar antara 1 – 1 ½ km. Dengan batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara Desa Raci Wetan, Sebelah Selatan Bengawan Solo, Sebelah Timur Desa Sidorejo, dan Sebelah Barat Desa Mojopuro Wetan. Total luas wilayah menurut penggunaan adalah 538,900 m².³⁷ Desa ini termasuk dalam wilayah kecamatan Bungah, dimana kecamatan ini memiliki desa dengan jumlah 22 desa diantaranya Abar-Abir, Bedanten, Bungah, Gumeng, Indrodelik, Kemangi, Kisik, Kramat, Masangan, Melirang, Mojopurogede,

³⁶ Matthew B Miles and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE. 1984. Hlm. 21-25.

³⁷ <http://desa-melirang-bungah.blogspot.com/2014/03/profil-desa-melirang.html>. Akses 20 Desember 2018

Mojopurowetan, Pegundan, Raciwetan, Sidokumpul, Sidomukti, Sidorejo, Sukorejo, Sukowati, Sungonlegowo, Tanjungwidoro dan Watuagung.³⁸

Potensi sumber daya yang dimiliki oleh wilayah desa melirang di antaranya pertanian, peternakan, perikanan, dan bahan galian. Sedangkan potensi sumber daya manusia, memiliki jumlah penduduk +- 9.000 jiwa. Sebagian kecil mata pencahariannya sebagai karyawan swasta, dagang, PNS, guru dan wiraswasta. Sedangkan sebagian besar dari mereka bermatapencaharian petani.

4.2. Badan Usaha Milik Desa Melirang

Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Desa melirang salah satu dari 22 desa yang ada di kecamatan Bungah yang mendirikan BUMDesa. BUMDesa milik desa melirang ini dirintis oleh kepala desa melirang yaitu bapak H. Muwaffaq, M.E.I. Beliau telah merintis BUMDesa ini mulai tahun 2015.

Akhirnya, BUMDesa milik desa melirang berdiri pada bulan April Tahun 2015 tetapi secara operasionalnya mulai berjalan pada bulan Januari 2016 dengan modal awal berjumlah Rp. 9.500.000,00. Pada saat itu beliau menyerahkan tugas BUMDesa melirang kepada anak-anak muda yang baru menyelesaikan perkuliahan mereka. Dimana pada saat itu yang menjadi nahkoda kepemimpinan diserahkan kepada Eka Wahyudinatul Hijjah, S.Pd.

BUMDesa Melirang dibentuk dengan nama BUMDes “eMHa”, dimana kata “eMHa” ini merupakan singkatan dari Melirang Hebat. Filosofi yang ada pada nama tersebut diharapkan adanya kehebatan yang ada pada tubuh BUMDesa baik dari segi Sumber Daya Manusia, pelayanan, dan kemudahan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun Motto dari BUMDes ini adalah Memberdayakan Masyarakat Menuju EKO MANDI BERSIH (EKONomi MANDiri, Berprestasi, bErinovasi, beRdedikasi dan

³⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Bungah,_Bungah,_Gresik. akses 20 Desember 2018

penuh kaSIH). Sedangkan Motto pelayanannya adalah CANTIK (Cepat, AkuNtable, Tepat dan simpatIK).

Beberapa Motto tersebut dijadikan sebagai pedoman atau prinsip bagi jalannya BUMDesa “eMHa”. Oleh karenanya dengan prinsip tersebut BUMDesa selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan manajemen di dalam BUMDesa agar selalu menciptakan inovasi-inovasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membentuk diri dengan karakter yang penuh kasih atau simpatik seperti yang menjadi semboyan. Karakter ini diharapkan dimiliki oleh setiap Sumber daya manusia yang ada di dalam tubuh BUMDesa karena karakter ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam mengelola sebuah lembaga atas dasar kekeluargaan. Sebagaimana dalam ayat al-Qur’an berikut ini:

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ

فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan". dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.

Inilah yang harus diperhatikan oleh setiap pengelolaan organisasi atau lembaga, bahwasanya mencari keuntungan itu penting tetapi yang lebih penting lagi adalah menjalin kekeluargaan karena dengan mempererat jalinan kekeluargaan maka keuntungan itu pun akan semakin meningkat.

Bentuk hubungan yang dijalankan sesuai dengan garis hubung pada struktur organisasi diatas menunjukkan bahwa dalam organisasi tersebut terdapat hubungan instruksi, konsultatif dan pertanggungjawaban. Setiap

³⁹ QS. Asy-Syuraa (42): 23.

pengelola BUMDes pun jelas terdapat job description dari tugas, tanggungjawab dan wewenang pemegang jabatan masing-masing.

Pada awal berdiri sampai pada Tahun 2018 aset yang dimiliki sudah mencapai sekitar \pm 700 juta. Adapun jenis usaha yang dirintis hingga Bulan Maret Tahun 2019 lebih dari 30 jenis usaha. Sedangkan di bulan April 2019 menurut ketua BUMDes “eMHa” eka sapaannya bahwa “ saya pada bulan April juga mau menggoalkan kerjasama dengan agen sembako, mbak” tuturnya. Disela-sela dia melayani masyarakat, sambil menjelaskan bahwa semua jenis usaha yang dirintis dan dikelola oleh BUMDes “eMHa” pada intinya tidak mematikan usaha rumahan/toko-toko kecil yang ada di masyarakat karena tujuan berdirinya BUMDes ini adalah selain untuk mencari keuntungan supaya pemerintahan desa Melirang ke depan tidak selalu menggantungkan pada dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah tetapi lebih dari itu BUMDes ini bertujuan untuk mensejahterahkan, memudahkan dan memberdayakan masyarakat. Sehingga setiap usaha yang dikelola oleh BUMDes akan selalu didukung oleh masyarakat.

Adapun usaha masyarakat yang menjalin kerjasama mitra dengan BUMDes “eMHa” diantaranya adalah usaha kopyah produksi masyarakat melirang, catering, snack dan jenis-jenis makanan. Begitu juga dalam usaha jasa keuangan berupa pinjaman, BUMDes juga telah memberikan pinjaman dalam bentuk ekonomi masyarakat. Mereka mendapatkan kemudahan dalam pengajuan pinjaman ini. Menurut ketua BUMDes “eMHa”, nasabah pinjaman dengan platform ekonomi masyarakat lebih banyak dibanding dengan platform kredit barang atau konsumtif. Bahkan dapat dikatakan 40% lebih yang mengajukan dengan platform tersebut. sedangkan pengajuan dengan platform kredit barang 25% dan konsumtif 35%. Berarti, dapat diindikasikan bahwa BUMDes mampu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui usaha simpan-pinjamnya.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan ketua BUMDes “eMHa” pada tanggal 5 Maret 2019.

Usaha-usaha yang telah dikembangkan oleh BUMDes “eMHa” dibangun berdasarkan kultur dan kondisi warga desa. Salah satunya usaha produksi pupuk guano. Usaha produksi pupuk tersebut dirintis setelah ada peternakan kelelawar di masyarakat.⁴¹ Banyaknya kelelawar yang ada di dalam goa melirang dimanfaatkan. Warga tidak mengusirnya tetapi menjadikan kotoran binatang malam itu sebagai pupuk. Sumbangsih yang bagus untuk ekonomi masyarakat. Akan tetapi sepenuturan ketua BUMDes disaat kami wawancarai ada banyak kendala dalam produksi pupuk guano, diantaranya: pengambilan kotoran kelelawar yang masih menggunakan metode tradisional, lokasi gua melirang yang masih mistis dan biaya produksi yang dapat dikatakan cukup mahal. Sehingga biaya produksinya pun sangat besar dibanding dengan hasilnya. Kotoran yang dihasilkan pun sangat terbatas. Memang benar, permintaan akan pupuk guano ini sangat banyak peminatnya bahkan sampai ke luar Jawa, tetapi karena hasil kotoran terbatas dan tidak semua orang dapat masuk ke dalam gua maka produksi pupuk ini masih belum bisa dicarikan solusi agar dapat berproduksi terus. Menurut ketua BUMDes sendiri menyatakan bahwa selama tahun 2018 ini tidak memproduksi pupuk guano dikarenakan ada beberapa kendala yang telah disebutkan di atas sedangkan hasilnya pun dalam satu tahun hanya berproduksi 2 kali dengan hasil bersih kira2 Rp.1.800.000,00. Oleh karenanya pihak pengelola masih berusaha agar produksi pupuk ini terus dijalankan.

BUMDes “eMHa” termasuk BUMDes yang masih muda karena jangka waktu berdiri yang relatif baru tetapi mampu mempunyai prestasi dalam segi pengembangannya. Paling tidak, usaha yang dikelolanya telah menyabet juara pertama lomba antar BUMDes pada tahun 2016 di Tingkat Kabupaten Gresik dan Juara III (Tiga) lomba Badan Usaha Milik Desa se-Provinsi Jawa Timur di tahun 2017. Banyak tawaran-tawaran bentuk kerjasama yang datang menghampiri BUMDes ini. Adanya tawaran-tawaran kerjasama tersebut, disambut baik oleh pengelola BUMDes “eMHa”, tetapi

⁴¹ Akmalul azmi, *mengenal lebih jauh bumdes emha yang beromset ratusan juta*, <http://timesindonesia.ac.id>. Akses 12 Februari 2019

tidak semua tawaran mereka setuju karena perlu difikirkan dengan bijaksana agar bentuk-bentuk kerjasama tersebut tidak merugikan dan mematikan usaha-usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat.

4.3. Strategi Pengembangan BUMDES

Badan usaha milik desa yang dimiliki desa melirang yaitu BUMDes “eMHa”, mempunyai karyawan yang solid karena diisi oleh anak-anak muda yang aktif dan kreatif. Bahkan dalam jangka waktu berdiri yang relatif muda masih 4 tahun, mereka telah menunjukkan keberhasilan mereka dalam mengelola BUMDes dengan beberapa penghargaan-penghargaan yang telah mereka raih baik di tingkat kabupaten atau di tingkat propinsi.

Pengembangan BUMDes “eMHa” jika dilihat dari segi bisnis, mempunyai banyak jenis usaha baik dari unit perdagangan, unit jasa keuangan maupun unit produksi ada di dalamnya. Unit perdagangan dan unit produksi merupakan unit usaha di sektor riil/ekonomi seperti diantaranya menjalankan usaha pertokoan dengan penjualan ATK, Foto Copy, Home industri (dimana hal ini dilakukan melalui cara kerjasama dengan masyarakat), persewaan alat-alat pertanian, pengelolaan pupuk guano (pupuk kotoran kelelawar), dan masih banyak usaha riil yang dijalankan oleh BUMDes sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sedangkan unit jasa keuangan seperti menjalankan usaha simpan pinjam dan kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan nasional sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Jika dilihat dari segi korporat atau lembaga, pengembangan BUMDes “eMHa” lebih fokus pada keberlanjutan lembaga (*corporate sustainability*). Bentuk keberlanjutan kelembagaan ini dilakukan dengan cara memperbaiki manajemen dan sumber daya manusia. Menurut penuturan ketua BUMDes, bahwasanya usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki manajemen itu selalu ada setiap tahun karena setiap tahunnya pasti ada monitoring dan evaluasi tetapi masih belum maksimal. Bahkan terkait sumber daya manusia, BUMDes juga sebenarnya sangat membutuhkan karyawan baru tetapi ketika ditawarkan kepada masyarakat, mindset mereka ketika masuk ke BUMDes adalah terkait penggajian. Hal ini lah yang belum bisa diberikan oleh

BUMDes sesuai dengan penggajian yang layak, terlebih kami (BUMDes) masih berjalan 4 tahun dengan pengelolaan yang bisa dikatakan belum bagus sekali yang sesuai dengan standar manajemen korporate.⁴² Akan tetapi dengan melihat perkembangan BUMDes yang semakin meningkatkan unit usaha-usahanya di sektor riil, masyarakat semakin menyakini dan percaya terhadap keberadaan dan pengelolaan BUMDes “eMHa”. Sehingga banyak dari masyarakat sekitar yang menjadi nasabah atau melakukan kerjasama dengannya.

Jika dilihat dari segi fungsional, pengembangan BUMDes “eMHa” telah melakukan sesuai dengan fungsionalnya sebagai BUMDes yaitu mewadai berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan. Mewadai usaha masyarakat ini dilakukan melalui cara kerjasama mitra dan juga bentuk sosial melalui cara bakti sosial, penyantunan janda dan anak yatim serta pemeliharaan gedung olah raga. Dalam hal ini fungsi BUMDes sebagai lembaga komersil dan sosial dapat diakomodir oleh BUMDes “eMHa”. Artinya, BUMDes menjalankan fungsinya sebagai lembaga komersial dengan mengembangkan unit-unit usaha riilnya dan juga sebagai lembaga sosial dengan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada ketua BUMDes “eMHa”, peneliti menarik kesimpulan bahwa BUMDes belum menemukan strategi yang terkonsep dalam implementasi strategi yang digunakan. Menurut ketua, strategi yang digunakan BUMDes untuk pengembangan usaha adalah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Padahal suatu kepercayaan itu bukanlah implementasi dari strategi yang digunakan, tetapi kepercayaan adalah suatu perilaku konsumen akhir setelah seseorang itu memperoleh stimuli yang telah dilakukan oleh BUMDes. Maka dari pemaparan yang telah peneliti temukan belum ada strategi yang jelas terkait pengembangan usaha (bisnis) atau korporate (lembaga) nya.

⁴² Wawancara dengan ketua BUMDes pada tanggal 5 Maret 2019.

Strategi yang dibentuk oleh korporasi (lembaga) akan melalui tiga tahapan strategi, yaitu:⁴³ Analisis Strategi, Pilihan Strategi, Implementasi Strategi. Strategi itu didapatkan melalui turunan visi dan misi yang kemudian dianalisis menggunakan alat analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Alat yang digunakan untuk menganalisis adalah Matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*), alat ini merupakan alat pencocokan yang membantu para manajer mengembangkan empat jenis strategi⁴⁴ diantaranya: Strategi SO (*Strengths-Opportunities*), Strategi WO (*Weaknesses- Opportunities*), Strategi ST (*Strengths-Threats*), Strategi WT (*Weaknesses-Threats*).

Strategi yang dilakukan oleh BUMDes pada dasarnya sudah memenuhi fokus capaian dengan berhasilnya pengembangan usaha-usaha yang ada dan pengelolaan korporasi dari BUMDes. Hal ini dapat dijelaskan bahwa fokus capaian jika dilihat dari segi bisnis, korporasi dan fungsionalnya BUMDes “eMHa” sudah memenuhinya. Akan tetapi masih ada hal yang perlu diperbaiki yaitu pada level korporasi/lembaga. Sebagaimana pada teori bahwa Strategi dapat dibedakan berdasarkan tingkat agregasi (*level of aggregation*). Klasifikasi yang paling banyak dijumpai dalam literatur manajemen strategik adalah level fungsional, level bisnis, dan level korporasi. Pada level fungsional mencakup aspek-aspek fungsional spesifik dalam sebuah organisasi. Strategi pada level bisnis membutuhkan pengintegrasian strategi-strategi level fungsional untuk serangkaian produk dan/ jasa tertentu yang ditujukan bagi segmen pelanggan spesifik. Sedangkan strategi level korporat (*multi-business strategies*) dibutuhkan untuk menyelaraskan berbagai strategi level bisnisnya.⁴⁵

Pengelolaan suatu organisasi itu terletak pada mainset para pengelolanya atau para pengambil kebijakan yang tidak hanya terkonsep

⁴³ Fandy Tjiptono, dkk., *Pemasaran Strategik*,..... Hlm: 129.

⁴⁴ Fred R David, *Strategic Management*, 12 ed, Terj. Dono Sunardi, Jakarta: Salemba Empat, 2009. Hlm. 327-330.

⁴⁵ Fandy Tjiptono, dkk., *Pemasaran Strategik*.... Hlm: 135.

secara teoritis saja tetapi diperlukan suatu strategi pengembangan secara *socio-culture* sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut.

4.3. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Desa Melirang, sebagian besar masyarakatnya mempunyai kesejahteraan ekonomi di tingkat menengah. Banyak dari mereka mempunyai pekerjaan di bidang kewirausahaan, Pegawai Negeri Sipil, guru atau di luar itu yaitu sebagai buruh pabrik dengan UMR kota Gresik dan juga petani. Bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan dalam bidang kewirausahaan, beberapa diantara mereka merasa terbantukan dengan adanya usaha-usaha yang dimiliki oleh BUMDes “eMHa” karena salah satu usahanya yaitu simpan pinjam dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman baik dengan tujuan konsumtif (misalnya untuk biaya sekolah anak atau untuk membeli kebutuhan keluarga) atau tujuan produktif (permodalan usaha, bermitra, pendampingan, dll) dengan adanya pembatasan pinjaman yang telah ditentukan dari pihak BUMDes.

Berbagai jenis usaha yang telah dijalankan oleh BUMDes pun telah memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat tidak hanya melalui simpan pinjam tetapi usaha-usaha yang lain salah satu contohnya agen LPG dan sembako yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki toko atau warung-warung kecil agar tidak lagi jauh-jauh mendapatkan LPG atau sembako yang nilai jualnya sama sehingga dapat lebih efektif dan efisien bagi masyarakat.

Tujuan utama pendirian BUMDes “eMHa” adalah mensejahterahkan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat EKOMANDI. Dimana cara BUMDes mensejahterahkan masyarakat agar mendapatkan peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat secara mandiri, tidak merugikan atau mematikan usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini dikarenakan dalam tubuh BUMDes sendiri kekurangan pengelola dan belum terkonsepnya strategi-strategi yang harus diimplementasikan. Pada dasarnya menurut

pengamatan peneliti, BUMDes “eMHa” lebih fokus pada memperbanyak bisnis (untuk mendapatkan keuntungan), sedangkan sosialnya belum kuat untuk diseimbangkan. Padahal fungsinya sebagai lembaga sosial, BUMDes juga harus dapat memberikan pemberdayaan agar mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan BUMDes “eMHa” yaitu menjalin kerjasama mitra dalam produksi barang-barang usaha masyarakat contohnya produksi kopyah, catering dan snack. Begitu juga produksi pupuk guano yang merupakan produksi pupuk milik desa karena usaha ini telah dikembangkan dan dibangun berdasarkan kultur dan kondisi warga desa.

Bentuk upaya yang dilakukan oleh BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat melalui *sosio-culture* desa masing-masing. *Sosio-culture* ini disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan kultur yang diperlukan oleh masyarakat. Menurut penuturan ketua BUMDes, bahwasanya dalam waktu dekat di tahun ini (2019) akan mengadakan pelatihan bank sampah. Hal ini merupakan salah satu upaya BUMDes untuk memberdayakan masyarakat terkait bank sampah karena upaya untuk mengadakan pelatihan bank sampah ini sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh BUMDes saat ini. Nasabah yang ikut bank sampah pun cukup banyak sehingga selain untuk memberdayakan masyarakat, dengan tetap menjalankan unit bank sampah bermanfaat untuk merubah mainset masyarakat agar ikut menjaga kesehatan lingkungan dengan cara mengumpulkan dan memilah-milah sampah organik dan sampah nonorganik di tingkat rumah tangga. Selain itu, BUMDes juga dapat melakukan upaya-upaya lain untuk dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat melalui workshop atau pelatihan dengan segmentasi para wirausaha muda atau pemula atau dengan mencetak wirausaha baru. Upaya-upaya ini harus diimbangi dengan manajemen dan sumber daya yang bagus dan kuat.

Bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh BUMDes di atas dapat dianalisis sebagaimana pada teori fungsionalisme struktural dengan sistem tindakan oleh Talcott Parsons dengan konsep AGIL. Dimana sistem tindakan

skema AGIL tersebut diantaranya: organisme behavioral, sistem kepribadian, sistem sosial dan sistem kultural.⁴⁶ Sistem-sistem tersebut telah disesuaikan oleh BUMDes “eMHa” dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan *socio-culture* masyarakat desa melirang.

Upaya yang telah dilakukan oleh BUMDes merupakan konsep dari kesejahteraan. Mengapa demikian? Karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BUMDes termasuk dalam konsep kesejahteraan yang lebih komprehensif dengan memasukkan konsep-konsep lain seperti pembangunan yang memperhatikan aspek sosial dan aspek pelestarian lingkungan. Dimana konsep tersebut telah diimplementasikan melalui pemberdayaan masyarakat.

Akan tetapi konsep ini juga telah dimiliki oleh Islam bahwasanya konsep kesejahteraan itu tidak dinilai dengan ukuran materi saja, tetapi dengan non materi seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan Islam, masyarakat dapat dikatakan sejahtera bila memenuhi 2 kriteria:⁴⁷

1. Terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat baik pangan, sandang, papan, pendidikan maupun kesehatan.
2. Terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia.

Apa yang telah dilakukan oleh BUMDes sebagai upaya untuk mensejahterakan secara ekonomi memang benar demikian. Karena untuk dapat menjaga agama maka diperlukan penguatan ekonomi agar tidak terperosok ke lembah kejahatan. Berarti, ketika masyarakat kita telah terpenuhi secara ekonomi/material maka dalam hal spiritualnya akan dapat ikut seimbang. Akan tetapi tidak semua bisa berjalan dengan seimbang, bisa jadi ketika seseorang tersebut telah terpenuhi secara materialnya maka seseorang tersebut malah terperosok pada perbuatan yang dilarang seperti mencuri, menjambret, menipu dll. Pada intinya upaya-upaya yang telah

⁴⁶ George Ritzer,... Hlm: 256-257.

⁴⁷ Ilyas Alimuddin, *konsep kesejahteraan dalam islam*, [http: www.makassar.tribunnews.com](http://www.makassar.tribunnews.com) akses 5 Maret 2019.

dilakukan oleh BUMDes juga sesuai dengan kesejahteraan dalam islam. Karena tujuan mendirikan BUMDes tidak lain untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

5.PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dikemukakan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan oleh BUMDes pada dasarnya sudah memenuhi fokus capaian dengan berhasilnya pengembangan usaha-usaha yang ada dan pengelolaan korporasi dari BUMDes. Hal ini dapat dijelaskan bahwa fokus capaian jika dilihat dari segi bisnis, korporasi dan fungsionalnya BUMDes “eMHa” sudah memenuhinya. Akan tetapi masih ada hal yang perlu diperbaiki yaitu pada level korporasi/lembaga. Pada level ini, BUMDes belum menemukan strategi yang terkonsep dalam implementasi strategi yang digunakan. Bahkan dalam kaitannya dengan strategi yang harus dilakukan oleh BUMDes, peneliti belum menemukan adanya strategi yang jelas baik dalam pengembangan usaha (bisnis) atau korporate (lembaga) nya. Karena dalam menentukan strategi diperlukan tahapan analisis, pilihan dan implementasi strategi. Dimana analisis strategi itu didapatkan melalui turunan visi dan misi yang kemudian dianalisis menggunakan alat analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Meskipun secara pengembangan bisnis, BUMDes telah menghasilkan omzet yang meningkat setiap tahunnya.
2. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat yang telah dilakukan oleh BUMDes “eMHa” melalui pemberdayaan masyarakat yaitu dalam bentuk menjalin kerjasama (menjadikan masyarakat sebagai mitra usaha) dalam produksi barang-barang usaha masyarakat contohnya produksi kopyah, catering dan snack. Begitu juga produksi pupuk guano yang merupakan produksi pupuk milik desa karena usaha ini telah dikembangkan dan dibangun berdasarkan kultur dan kondisi warga desa. Bentuk upaya ini merupakan *Sosio-culture* yang disesuaikan dengan

kebutuhan, kondisi dan kultur yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu ada pelatihan bank sampah sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, dengan memberikan manfaat untuk merubah mindset masyarakat agar ikut menjaga kesehatan lingkungan. Akan tetapi dalam upaya-upayanya dapat dikatakan masih kurang maksimal dikarenakan fungsi dari BUMDes adalah sebagai lembaga komersial dan sosial. Sehingga keduanya harus bisa berjalan seimbang.

5.2. Saran-saran

Ada beberapa saran-saran yang peneliti perlu ajukan untuk kemajuan bersama, diantaranya:

1. Strategi yang digunakan dalam pengembangan bisnis maupun korporasi (lembaga) harus melalui analisis strategi yang tepat sehingga hasil strategi yang akan diimplementasikan pun akan tepat pula.
2. Dalam pendirian lembaga BUMDes diperlukan planning yang kemudian diturunkan ke visi dan misi. Sehingga dalam pengembangan bisnisnya pun akan terkonsep dengan cara melakukan *bussines plan*.
3. Upaya peningkatan kesejahteraan sebagai misi dari BUMDes belum teraplikasikan dengan maksimal sehingga bentuk upaya yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat pun belum menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan ibu-ibu PKK atau perangkat desa yang mereka juga mempunyai bagian dan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat. Sehingga sesuai dengan fungsinya BUMDes adalah sebagai lembaga komersial dan lembaga sosial.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Wan., *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Memanfaatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (Studi Keluarga Miskin Di Desa Teluk Pakedai II Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya)*, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIS-2012.
- Alimuddin, Ilyas., *konsep kesejahteraan dalam islam*, [http: www.makassar.tribunnews.com](http://www.makassar.tribunnews.com). akses 5 Maret 2019
- Anto, M.B. Hendrie., *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

- Arsyad, Lincoln., *Ekonomi Mikro*, Jakarta: Gemapress, 1999.
- Auliana, *Hiruk Pikuk Perkembangan Koperasi di Indonesai*,
www.kompasiana.com.,13 Juni 2018. Akses 14 Juli 2018.
- Azmi, Akmalul., *mengenal lebih jauh bumdes emha yang beromset ratusan juta*,
<http://timesindonesia.ac.id>. Akses 12 Februari 2019
- Bahril, Samsul Alil., *Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa*, Skripsi Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Bungkaes, Heri Risal., dkk., *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*, Journal “ACTA DIURNA” Edisi April 2013.
- Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Malang: DEPDIKNAS PKDSP FEUB, 2007.
- Chapra, Umer., *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- David, Fred R, *Strategic Management*, 12 ed, Terj. Dono Sunardi, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Field, John., *Modal Sosial*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2018.
- Hendri, Eko., *kades m.muwaffaq, kreator bumdes terbaik dan pendiri sekolah hafiz gratis*, www.jawapos.com akses 12 februari 2019
- Hutomo, Mardi Yatmo., *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, Naskah Seminar Bappenas tanggal 6 Maret 2000.
- Malik, Abdul., Dkk, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tertinggal Melalui Pemanfaatan IPTEK*,
<https://www.researchgate.net/publication/319493010>.
- Mardha Kashi, Anggria dan Ahmad Zuber, *Upaya Pengentasan Buruh Genteng Melalui Kegiatan Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Jurnal Sosiologi DILEMA, Vol. 31 No. 1 Tahun 2016.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE. 1984.
- Mubyarto., *Reformasi Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nasikun, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1996.
- Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*, Yogyakarta: Media Wacana, 2007.

Purbaya, A. Ghofar., *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil Laut di Pantai Kenjeran Lama Surabaya*, OECONOMICUS: Journal Of Economics, Vol. 1, No. 1, Des 2016.

P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.

Sugiyono., *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Tjiptono, Fandy., dkk., *Pemasaran Strategik*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008.

Tjiptono, Fandy., *Strategi Pemasaran*, Edisi III, Yogyakarta: Andi Offset, 2008.

Yunus, Muhammad dan Alan Jolis, *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*. Terjemahan: Irfan Nasution, Depok: Marjin Kiri, 2007.

PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bungah,_Bungah,_Gresik. akses 20 Desember 2018

<http://desa-melirang-bungah.blogspot.com/2014/03/profil-desa-melirang.html>.

Akses 20 Desember 2018